

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini disusun untuk menjawab pertanyaan riset mengenai “mengapa Uni Eropa menyikapi kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia melalui WTO?” dan “mengapa Uni Eropa memilih WTO alih-alih rezim lingkungan Perjanjian Paris dalam menanggapi kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia?”. Jawaban yang didapati dari penelitian ini adalah bahwa pemilihan sikap Uni Eropa tersebut didorong oleh dua hal utama, yaitu keberadaan tujuan hegemonik dan struktur hegemoni. Tujuan hegemonik yang dimaksud adalah kontrol atas rantai suplai untuk mencapai *leadership* dalam industri hijau.

Kontrol terhadap industri hijau akan membuat Uni Eropa mampu mengkapitalisasi pasar dan keuntungan ekonomi berkelanjutan dengan sekaligus mendapat legitimasi atas beragam agenda industri lainnya melalui norma lingkungan. Di saat yang bersamaan, kontrol terhadap industri hijau juga merupakan sarana bagi Uni Eropa untuk memenuhi kepentingan moralnya berupa cara pandang (ideologi dan *value*) terhadap bagaimana negara seharusnya menanggapi perubahan iklim. Dengan kata lain, tujuan Uni Eropa lebih dari sekadar ekonomi saja atau sekadar moral saja, melainkan kontrol dan legitimasi di saat yang bersamaan (institusionalisasi kekuasaan untuk membentuk sistem internasional).

Di sisi lain, untuk memenuhi tujuan hegemonik tersebut, Uni Eropa terdorong untuk menggunakan struktur hegemoni yang ada. Struktur hegemonik yang dimaksud adalah struktur perdagangan internasional. Praktik perdagangan internasional yang ada merupakan sebuah struktur hegemoni yang tengah berlaku dan menjadi paradigma. Uni Eropa memilih WTO karena Uni Eropa sendiri merupakan bagian dari struktur tersebut dan berperan menjadi Material Capability yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh Ideas dan Institusi Internasional. Keyakinan negara-negara terhadap perdagangan internasional dan *rule of law* dalam WTO membuat perdagangan internasional menjadi sebuah kebenaran yang dianggap normatif. Dengan adanya hubungan resiprokal antara norma liberalisasi perdagangan, WTO, dan Uni Eropa, maka Uni Eropa memiliki gravitasi terhadap WTO untuk mencapai tujuan hegemonik nya.

Peneliti menyadari benar bahwa penelitian ini condong melebar dan secara relatif merupakan penelitian yang luas. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan terhadap sikap satu aktor internasional dengan menguak variabel-variabel pendorong nya di tingkat struktural. Dengan mencakup banyak studi kasus di saat yang bersamaan, peneliti memahami bahwa tiap studi kasus juga memiliki hak untuk diteliti secara terfokus, dan memiliki banyak faktor pendorong pula berdasarkan banyaknya sudut pandang yang dapat diaplikasikan terhadap masing-masing studi kasus yang peneliti angkat sebagai pendukung argumen. Kenyataan tersebut peneliti akui sebagai keterbatasan penelitian ini. Oleh karenanya, keterbatasan penelitian ini dapat menjadi kesempatan luas bagi

penelitian-penelitian berikutnya untuk membahas lebih mendalam terhadap beragam studi kasus yang peneliti paparkan.

Peneliti juga menyadari bahwa dengan menerapkan metode CON hanya dengan satu teori saja membuat penelitian ini masih relatif lebih lemah validitasnya dibandingkan dengan penggunaan teori berganda. Untuk itu, penelitian-penelitian berikutnya dapat melengkapi penelitian ini dengan mengaplikasikan analisis komparasi yang lebih mendalam antara Teori Kritis dengan teori atau paradigma lainnya.

4.2 Saran

Penelitian ini menyarankan kepada praktisi dan pembuat kebijakan di Indonesia untuk memperkuat pemahaman dan narasi mengenai tujuan lingkungan yang terkandung dalam kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Hasil penelitian yang membuktikan bahwasanya norma-norma internasional digunakan sebagai alat bagi negara lain untuk mencapai hegemoni membuat pemerintah Indonesia seharusnya menggerakkan narasi di lintas rezim (lintas norma perdagangan dan pelestarian lingkungan). Hal tersebut peneliti yakini sebagai cara yang efektif untuk menggunakan legitimasi yang terkandung di dalam sistem untuk melawan sistem itu sendiri.

Mengingat kebijakan hilirisasi dan ekspor nikel adalah kebijakan jangka menengah panjang, maka penelitian ini terbatas waktu untuk memahami secara definitif mengenai kebenaran atas niatan dan beragam proyeksi Keberhasilan niatan industri dan lingkungan Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan pergantian tatanan pemerintahan yang akan datang pada pemilu 2024. Oleh karena

itu, peneliti menyarankan adanya reproduksi penelitian ini pada masa mendatang untuk membuktikan lebih lanjut mengenai kemampuan teori yang ada dalam menjelaskan fenomena sosial tersebut.

Peneliti juga menyarankan penelitian lebih lanjut mengenai WTO sebagai variabel struktur hegemonik. Hal tersebut mengingat bahwa WTO telah mengalami *deadlock* karena kurangnya anggota *Appellate Body* selama 5 tahun (pada waktu tulisan ini di susun) dan tengah diupayakan untuk beroperasi kembali oleh Uni Eropa. Hal tersebut tentu akan menjadi krusial untuk menakar pengaruh WTO di masa depan sebagai institusi internasional dan struktur hegemoni.